**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kondisi ini menjadi keinginan setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Selain tujuan kesejahteraan yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pemerataan. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak adanya pemerataan baik dalam hal pendapatan, pendidikan, pembangunan malah ketimpangan yang semakin meluas.

Para ahli ekonomi pun mengubah tujuan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi nya saja yang diperhatikan tetapi pembangunan manusia yang bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan suatu daerah yang secara luas menjadi kemajuan suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya (UNDP).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu:

1. Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas;
2. Lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir;
3. Standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan paritas daya beli diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan. Selain kualitas hidup manusia, investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004:122). Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan (Todaro, 2006:34).

Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2,3 dan 4 yang menyatakan bahwa  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang dan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 ayat 1 yaitu  Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada belanja daerah untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta sarana prasarana untuk menunjang investasi. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila angka IPM meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Selain itu pendapatan masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran pendapatan memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Penduduk miskin akan lebih memprioritaskan pengeluarannya untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik jika hanya mengandalkan pendapatannya. Kemiskinan akan menghambat masyarakat untuk mengonsumsi makanan bergizi, mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas serta menikmati layanan kesehatan lebih baik. Dari sudut pandang ekonomi faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan sumber daya manusia yang memiliki tingkat produktivitas rendah.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah yang cukup besar menjadikan Jawa Barat mempunyai kekayaan sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya manusia yang sangat berpotensi untuk terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kelebihan yang dimiliki tersebut bisa saja menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi karena terkonsentrasi terhadap suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam maupun manusia yang melimpah.

Pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Pada tahun 2015, IPM Jawa Barat telah mencapai 69.50. Angka ini meningkat sebesar 0.7 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Barat pada tahun 2014 yang sebesar 68.80. Secara umum, pembangunan manusia Jawa Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015. IPM Jawa Barat meningkat dari 66.15 pada tahun 2010 menjadi 69.50 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Jawa Barat rata - rata tumbuh sebesar 0.99 persen per tahun.

Berikut ini tabel perbandingan LPE dan IPM Nasional dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015.

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Indonesia dan Jawa Barat Tahun 2014-2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wilayah | Tahun | | | |
| 2014 | | 2015 | |
| LPE (%) | IPM(%) | LPE(%) | IPM(%) |
| Indonesia | 5.02 | 68.90 | 4.79 | 69.55 |
| **Jawa Barat** | **5.09** | **68.80** | **5.03** | **69.50** |

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2014, menurut BPS, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.02% dan pada tahun 2015 sebesar 4.79%. Sehingga selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan sebesar 0.23%. Sedangkan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan LPE sebesar 0.06%, *trend* penurunan LPE ini tidak dibarengi dengan angka IPM yang terus mengalami kenaikan baik secara nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Hal yang menarik untuk dicermati adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2014-2015 masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional tetapi tidak dengan IPM yang terus berada dibawah rata-rata nasional.

Berikut ini tabel perbandingan rata-rata IPM seluruh Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Banten, DKI Jakarta dengan Jawa Barat tahun 2014-2015.

**Tabel 1.2**

**Rata-rata IPM Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat 2014-2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Daerah | IPM (%) | |
| 2014 | 2015 |
| 1 | Sumatera | 68.85 | 69.45 |
| 2 | Kalimantan | 68.55 | 69.01 |
| 3 | Banten | 69.89 | 70.27 |
| 4 | DKI Jakarta | 78.39 | 78.99 |
| **5** | **Jawa Barat** | **68.80** | **69.50** |

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel 1.2 yang menunjukkan angka perbandingan rata-rata IPM Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, IPM Provinsi Jawa Barat masih berada dibawah rata-rata provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan tidak jauh berada diatas rata-rata Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Hal ini menarik untuk dicermati karena dari segi infrastruktur dan segala kemudahan akses yang didapatkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Barat tentu lebih baik khususnya yang termasuk kedalam dimensi pendukung angka IPM itu sendiri seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Banyaknya perguruan tinggi dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang ada di Jawa Barat seharusnya bisa lebih baik dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lainnya yang berada di luar Pulau Jawa.

Kemudian jika dibandingkan dengan Provinsi Banten yang pernah menjadi bagian dari Provinsi [Jawa Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat), namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun [2000](https://id.wikipedia.org/wiki/2000) dengan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki seharusnya angka IPM Jawa Barat berada diatas Banten tetapi fakta menunjukkan sebaliknya. *Gap* yang cukup jauh pun ditunjukan dalam angka IPM Jawa Barat dengan Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif Jawa Barat yaitu DKI Jakarta.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Sementara untuk anggaran kesehatan, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU No.36/2009 tentang kesehatan. Dimana Pemerintah daerah diminta secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total anggaran di luar gaji.

Berikut persentase anggaran urusan pendidikan dan kesehatan Provinsi Jawa Barat:

**Tabel 1.3**

**Persentase Anggaran Urusan Pendidikan Menurut Provinsi di Pulau Jawa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Provinsi | Persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD (diluar transfer daerah) | |
| 2015 | 2016 |
| 1 | DKI Jakarta | 19,5% | 22,3% |
| 2 | Banten | 4,4% | 5,7% |
| **3** | **Jawa Barat** | **2,2%** | **2,9%** |
| 4 | Jawa Tengah | 2,3% | 2,9% |
| 5 | DI Yogyakarta | 9,0% | 9,7% |
| 6 | Jawa Timur | 2,2% | 1,7% |

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2016

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan persentase anggaran urusan pendidikan Provinsi Jawa Barat masih jauh dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 19,5%. Padahal Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta tetapi persentase diatas Jawa Barat menunjukkan jauh tertinggal dalam hal anggaran pendidikan. Dan yang menjadi perhatian adalah persentase Provinsi Banten yang berada diatas Jawa Barat, karena Provinsi yang dulu berada dalam wilayah administratif Jawa Barat dan memisahkan diri pada tahun 2000 tetapi persentase anggaran pendidikannya lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Tentu ini menjadi permasalahan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan.

**Tabel 1.4**

**Persentase Anggaran Urusan Kesehatan Menurut Provinsi di Pulau Jawa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Provinsi | Persentase anggaran urusan kesehatan dalam APBD (hasil evaluasi rancangan perda apbd) | |
| 2014 | 2015 |
| 1 | DKI Jakarta | 9.23% | 9.80% |
| 2 | Banten | 5,38% | 4.16% |
| **3** | **Jawa Barat** | **2,70%** | **2.60%** |
| 4 | Jawa Tengah | 11,61% | 10.89% |
| 5 | DI Yogyakarta | 4,77% | 5.28% |
| 6 | Jawa Timur | 12,67% | 8.03% |

Sumber : Ditjen Keuda Kemendagri

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan persentase anggaran urusan kesehatan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terendah dalam hal pengalokasian terhadap urusan kesehatan diantar 5 provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hanya Provinsi Jawa Tengah yang sudah memenuhi amanat undang-undang untuk pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10% dari total apbd. Padahal Provinsi Jawa Tengah persentase penduduk miskin nya masih lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat (lihat di tabel 1.6), tetapi persentase anggaran untuk kesehatnnya jauh diatas Jawa Barat dengan *gap* lebih dari 8%. Dan lagi, yang menjadi perhatian adalah persentase Provinsi Banten yang berada diatas Jawa Barat yang hanya setengahnya dari persentase anggaran Provinsi Banten yang mencapai 5,38% di tahun 2015. Tentu ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk sektor prioritas seperti kesehatan.

Realisasi penanaman modal merupakan salah satu komponen yang diharapkan turut serta membantu perekonomian suatu daerah termasuk Jawa Barat. Penanaman modal yang besar membuat lapangan pekerjaan terbuka luas dan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menaikkan pendapatan. Hal ini seperti ditunjukkan tabel 1.5 bahwa realisasi PMDN+PMA Jawa Barat tertinggi dibandingkan dengan seluruh provinsi lainnya secara nasional. Menerima 98,0 Triliun dengan besaran 18% dari total PMDN+PMA tentu harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah agar penanaman modal yang masuk dan berkembang di Jawa Barat turut serta membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang diharapkan.

**Tabel 1.5**

**Total Persentase PMDN+PMA Provinsi Jawa Barat terhadap Nasional Tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Lokasi | Investasi (Rp) | Persentase |
| **1** | **Jawa Barat** | **98,0 T** | **18,0%** |
| 2 | Jawa Timur | 67,9 T | 12,5% |
| 3 | DKI Jakarta | 60,7 T | 11,1% |
| 4 | Banten | 42,5 T | 7,8% |
| 5 | Kalimantan Timur | 39,4 T | 7,2% |
| 6 | Lainnya | 236,9 T | 43,4% |

Sumber : BKPM RI

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah yang mempengaruhi pembangunan manusia di Jawa Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat masyarakat tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yang berhubungan dengan proses pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan merupakan hal penting yang perlu ditangani pemerintah daerah Jawa Barat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi bila dilihat dengan daerah-daerah di pulau Jawa lainnya. Menurut Tabel 1.6 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat masih tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu mencapai 4,4 juta jiwa dengan besaran 9,57%.

**Tabel 1.6**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi**

**di Pulau Jawa Tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
| 1 | DKI Jakarta | 368.67 | 3,61 |
| 2 | Banten | 690.67 | 5,75 |
| **3** | **Jawa Barat** | **4,485.65** | **9,57** |
| 4 | Jawa Tengah | 4,505.78 | 13,32 |
| 5 | DI Yogyakarta | 485.56 | 13,16 |
| 6 | Jawa Timur | 4,775.97 | 12,28 |

Sumber: BPS

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih topik penelitian mengenai **“Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat”**.

* 1. **Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian** 
     1. **Identifikasi Masalah Penelitian**

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diilihat dengan seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Oleh karenanya dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu peran pemerintah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan. Persoalan yang muncul seperti perhatian pemerintah yang masih rendah, daya beli masyarakat masih rendah, kemiskinan yang menjadi permasalahan dasar dan perlu diketahui bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan.

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pembangunan manusia seperti akses untuk mendapatkan pendidikan masih rendah, infrastruktur untuk menunjang kesehatan masih belum memadai, dan pendapatan masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan.Keberhasilan pendidikan dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk menunjang kedua sektor tersebut apakah sudah terealisasi amanat undang-undang yang mewajibkan anggaran setidaknya 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan.

Dengan beberapa permasalahan yang telah diuraikan diatas, muncul pertanyaan sebagai berikut.

* + 1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dari penilitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
5. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama antara investasi, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap IPM Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat Untuk
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara investasi, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat.

* 1. **Kegunaan Penelitian**
     1. **Kegunaan Teoritis/Akademis**

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat.

* + 1. **Kegunaan Praktis/Empiris**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris :

1. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai salah satu media latih untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat.